

PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
TENAGA AHLI ANALISIS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)
(FISCAL TRANSFER FUND ANALYST)
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
GRANT NO. TFC1687/TFC3114

No. 04/UKPBJ.ST.37/06.05/09/2024

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* yang didanai oleh grant No. **TFC1687/TFC3114**, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. TENAGA AHLI ANALISIS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)
(FISCAL TRANSFER FUND ANALYST) (1 orang)
kode : TKDD

Kualifikasi :

- a. Latar belakang pendidikan diutamakan **pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, sosial, ekonomi, statistik, dan manajemen**
- b. Persyaratan kualifikasi teknis untuk **Penyedia Jasa Konsultan**, meliputi:
 - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
 - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan.
- c. Memiliki pengalaman dalam kajian perencanaan dan penganggaran program, monitoring dan evaluasi, dan penilaian efektivitas penggunaan DAK dan Dana Desa sekurang-kurangnya selama 5 tahun, dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
- d. Memiliki pengetahuan yang baik tentang proses, waktu, dan sistem perencanaan dan penganggaran DAK dan Dana Desa dan dibuktikan dengan referensi kerja.
- e. Menguasai teknik dan metodologi untuk pengolahan data menggunakan Excel/Stata/SPSS serta visualisasi data, dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
- f. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan, brief, dan rekomendasi kebijakan, dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
- g. Memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dibuktikan dengan hasil tes Bahasa atau referensi pekerjaan.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan penawaran dengan menuliskan kode: **TKDD** paling lambat **20 September 2024 pukul 10.00 WIB**, ditujukan kepada :

POKJA VIII Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Melalui e-mail : ulp@bappenas.go.id
Jakarta, 6 September 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TENAGA AHLI ANALISIS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)
(FISCAL TRANSFER FUND ANALYST)
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. Latar Belakang

Indonesia berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam upaya penurunan stunting dalam kurun hampir satu dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013, stunting mengalami perbaikan dari 37,2% menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi *stunting* terus mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,6% (SSGI 2022). Meskipun tren penurunan terus terjadi, angka ini masih tergolong tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat menurut kriteria yang ditetapkan oleh *World Health Organisation* (WHO). Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*, dengan target 14% di tahun 2024. Komitmen ini akan terus berlanjut untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Berbagai upaya multidimensi dan lintas sektor dilakukan untuk memenuhi target percepatan penurunan stunting. Sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting*, pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari Bank Dunia sebagai penguatan tata kelola penurunan *stunting*. Dari keberhasilan program pada periode pertama, yang berlangsung dari tahun 2018-2024, maka program INEY akan dilanjutkan pelaksanaannya untuk fase dua yang akan berlangsung pada tahun 2024-2028. Pelaksanaan PforR INEY fase dua akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai dari hibah multidonor *Global Financing Facility* (GFF) dan *Indonesia Human Capital Acceleration* (IHCA).

Pelaksanaan komponen hibah di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 akan difokuskan pada (1) penguatan kapasitas sinkronisasi perencanaan,

penganggaran, pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional, melalui analisis kinerja anggaran dan pembangunan, perumusan dan sosialisasi laporan pengeluaran dan tinjauan kinerja semester dan tahunan, perumusan dan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi, perumusan dan uji coba kerangka kerja pemantauan dan evaluasi Perpres 72, *dashboard* untuk pengembangan dan pengelolaan, analisis data; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan regional, melalui penyusunan rencana aksi dan adaptasi iklim untuk fortifikasi gizi dan pangan, pedoman perencanaan nasional dan daerah; (3) penguatan kualitas sistem pelaporan dana alokasi khusus untuk penurunan *stunting*; (4) pengembangan program pengetahuan dan produk pembelajaran yang terintegrasi untuk direplikasi.

Sebagai dukungan dalam penguatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* serta peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Perpres 72 terkait pelaksanaan pemantauan dan analisis dana transfer ke daerah untuk selanjutnya dilakukan analisis sinkronisasi dengan belanja pusat dan daerah, dibutuhkan tenaga ahli.

B. Tujuan

Posisi ini bertanggung jawab untuk mendukung fungsi Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* dalam melakukan pemantauan, analisis pemanfaatan dana transfer ke daerah, dan memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil analisis sebagai penguatan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Berkoordinasi dengan K/L terkait DAK *Stunting*, Dana Desa, dan pemerintah daerah dalam pengumpulan data terkait anggaran TKDD;
2. Menyusun metodologi analisis efektifitas pembiayaan DAK *Stunting*;
3. Menyusun konsep dan metodologi analisis pemanfaatan Dana Desa;
4. Menyusun metodologi pemantauan dan evaluasi TKDD yang mendukung percepatan penurunan *stunting*;
5. Menyusun laporan hasil analisis TKDD;

6. Menyusun analisis TKDD dan sinkronisasi dengan sumber anggaran lain dalam periode 2024-2028, beserta rekomendasi kebijakan;
7. Bekerja sama dengan Tenaga Ahli Kinerja Anggaran dan Program untuk analisis sinkronisasi penganggaran yang mendukung percepatan penurunan *stunting*
8. Bekerja sama dengan tenaga ahli di Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun metodologi pelaksanaan review penganggaran dana transfer serta menyajikan dengan baik hasil analisis yang telah dilakukan; serta
9. Penugasan lain yang diminta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat).

D. Keluaran

1. Desain monitoring dan evaluasi kinerja TKDD yang mendukung percepatan penurunan *stunting*;
2. Laporan analisis efektivitas dan kontribusi menu DAK *Stunting* terhadap percepatan penurunan *stunting*;
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja TKDD sebagai bagian dari laporan kinerja anggaran yang mendukung percepatan penurunan *stunting*;
4. Rekomendasi kebijakan hasil analisis TKDD dan sumber pembiayaan lain pada periode 2024-2028; serta
5. Penugasan lain yang diminta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat).

E. Syarat dan Kualifikasi

Persyaratan

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultan, meliputi:
 - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
 - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

- c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
2. Memiliki pengalaman dalam kajian perencanaan dan penganggaran program, monitoring dan evaluasi, dan penilaian efektivitas penggunaan DAK dan Dana Desa sekurang-kurangnya selama 5 tahun, dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
3. Memiliki pengetahuan yang baik tentang proses, waktu, dan sistem perencanaan dan penganggaran DAK dan Dana Desa dan dibuktikan dengan referensi kerja.
4. Menguasai teknik dan metodologi untuk pengolahan data menggunakan Excel/Stata/ SPSS serta visualisasi data, dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
5. Memiliki kemampuan dalam menyusun laporan, *brief*, dan rekomendasi kebijakan, dibuktikan dengan referensi hasil pekerjaan.
6. Memiliki kemampuan komunikasi baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dibuktikan dengan hasil tes Bahasa atau referensi pekerjaan.

Pendidikan

Minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, sosial, ekonomi, statistik, dan manajemen.

F. Lokasi Kegiatan

Kementerian PPN/Bappenas c.q Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Jalan Taman Suropati 2, Menteng, Jakarta Pusat.

G. Pelaporan

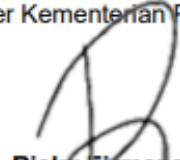
Tenaga ahli Ahli Analisis TKDD diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi hasil *desk review*, desain dan metode penilaian kinerja, hasil pertemuan koordinasi, hasil analisis, rumusan rekomendasi, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga ahli juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal dan akhir dengan rincian sebagai berikut. Laporan awal dan akhir dapat berubah sesuai *output* yang disepakati.

Tahun	Output
2024	Laporan awal mencakup rencana kerja dan rancangan desain, pemetaan koordinasi lintas sektor, dan metode analisis TKDD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil mencakup hasil koordinasi lintas sektor, data terkait TKDD, dan <i>preliminary findings</i> , paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2025	Laporan awal mencakup rencana kerja, <i>update</i> pengembangan metodologi dan tools analisis, konsep diseminasi dan publikasi hasil analisis, dan pemetaan koordinasi lintas sektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir mencakup laporan hasil analisis TKDD dan sinkronisasi TKDD dengan Belanja K/L dan APBD, bahan diseminasi, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2026	Laporan awal mencakup rencana kerja, <i>update</i> pengembangan metodologi dan tools analisis, konsep diseminasi dan publikasi hasil analisis, dan pemetaan koordinasi lintas sektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir mencakup laporan hasil analisis TKDD dan sinkronisasi TKDD dengan Belanja K/L dan APBD, bahan diseminasi, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2027	Laporan awal mencakup rencana kerja, <i>update</i> pengembangan metodologi dan tools analisis, konsep diseminasi dan publikasi hasil analisis, dan pemetaan koordinasi lintas sektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir mencakup laporan hasil analisis TKDD dan sinkronisasi TKDD dengan Belanja K/L dan APBD, bahan diseminasi, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2028	Laporan awal mencakup rencana kerja dan metodologi analisis data periode tahun 2024-2028, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir mencakup laporan hasil analisis TKDD dan sinkronisasi TKDD dengan Belanja K/L selama periode 2024-2028 serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.

Jakarta, 07 Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V
Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan
Kebudayaan,
Satker Kementerian PPN/Bappenas



Risky Firmansyah, SE
NIR. 198812102015031003